
SEKOLAH NEGARAWAN
POPULISME YANG MENIPU,
PATRONASE
YANG MENJERAT

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya draf buku ini. Buku ini lahir dari sebuah keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi kita saat ini yang tampak meriah di permukaan melalui ritual pemilihan umum rutin, namun terasa kosong dan rapuh di dalamnya. Fenomena ini menandai sebuah paradoks: semakin sering nama rakyat dipanggil dalam setiap pidato pejabat, semakin jauh kehendak rakyat diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Buku ini berupaya membongkar dua kekuatan besar yang menjerat negara kita: populisme menipu dan patronase yang menjerat. Populisme sering kali hadir sebagai topeng bagi kekuasaan lama yang menggunakan bahasa sederhana dan simbol kerakyatan untuk meraih legitimasi emosional, tanpa benar-benar membongkar struktur ketimpangan. Di balik layar, mesin patronase bekerja melalui relasi balas jasa yang menempatkan loyalitas di atas kompetensi, menjadikan negara sebagai ladang distribusi imbalan politik alih-alih institusi pelayanan publik.

Melalui naskah ini, penulis ingin menegaskan bahwa krisis yang kita alami bukan sekadar masalah moral individu, melainkan kegagalan desain sistem pemerintahan. Selama struktur konstitusional kita

memberikan ruang bagi konsentrasi kekuasaan yang berlebih dan meminimalkan mekanisme kontrol kedaulatan rakyat, maka pergantian pemimpin hanya akan menjadi rotasi wajah tanpa perubahan pola.

Sebagai jalan keluar, buku ini menawarkan gagasan Politik Kenegarawanan dan urgensi Amandemen Kelima UUD 1945. Kami mengusulkan desain Negara Pelayan Rakyat, di mana pemerintah diposisikan sebagai operator yang menjalankan mandat secara ketat, sementara kedaulatan rakyat hadir secara struktural melalui sistem pengawasan berlapis dan reposisi MPR sebagai Majelis Amanah.

Buku ini juga terinspirasi oleh pemikiran dari **Sekolah Negarawan** yang menekankan pentingnya menjaga nalar, nurani, dan etika bangsa melalui peran aktif kaum intelektual, rohaniawan, budayawan, serta TNI-Polri sebagai penjaga kedaulatan.

Semoga karya ini dapat memicu diskusi yang sehat bagi seluruh elemen bangsa, dari akademisi hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama merawat republik ini agar kedaulatan rakyat kembali nyata dan demokrasi kembali bermakna.

Jakarta, Februari 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....**i**

Daftar Isi.....**iii**

Daftar Gambar.....**viii**

BAB I. Pendahuluan: Demokrasi yang Tampak Meriah, Tapi Kosong.....**1**

1.1. Populisme sebagai Wajah Baru Kekuasaan Lama 2

1.2.Patronase Pemerintahan: Sistem Tak Terlihat yang Mengikat Negara.....3

1.3.Rakyat sebagai Sasaran, Bukan Tujuan Politik.....4

1.4.Mengapa Populisme dan Patronase Sulit Dilawan 5

BAB II. Apa Itu Populisme? Dari Retorika Rakyat ke Alat Kekuasaan **7**

2.1. Definisi Populisme: Antara Teori dan Praktik 8

2.2. Populisme Kiri, Populisme Kanan, dan Populisme Oportunistik 8

2.3. Ciri-ciri Populisme Pemerintah di Negara Berkembang 10

2.4. Populisme Elektoral: Janji Kejahatan Politik, Emosi, dan Simbol 11

2.5. Ketika "Atas Nama Rakyat" Menjadi Alibi Kekuasaan 13

BAB III. Patronase Pemerintahan: Jaring Kekuasaan yang Menjerat Negara 14

3.1. Apa Itu Patronase Pemerintahan 15

3.2. Hubungan Patron–Klien dalam Negara Modern 16

3.3. Patronase vs Meritokrasi 18

3.4. Patronase dalam Rekrutmen Pejabat dan Birokrasi 19

3.5. Mengapa Patronase Membuat Negara Tidak Efisien dan Tidak Adil 20

_Toc221021613

BAB IV. Kolaborasi Berbahaya: Populisme + Patronase = Demokrasi Palsu 22

4.1. Populisme sebagai Topeng Patronase 22

4.2. Janji Kerakyatan, Imbalan Pemerintah 23

4.3. Rakyat sebagai Objek Mobilisasi 25

4.4. Mengapa Oligarki Menyukai Populisme 26

4.5. Demokrasi Tanpa Kontrol dan Tanpa Akuntabilitas 27

BAB V. Dampak Nyata: Negara Salah Kelola, Rakyat Menanggung Akibat 29

5.1. Kebijakan Publik yang Tidak Rasional.....29

5.2. Korupsi Struktural, Bukan Sekadar Moral Individu 30

5.3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi 31

5.4. Kriminalisasi Kritik dan Represi Hukum 32

5.5. Negara yang Tak Lagi Melindungi Rakyat.....33

BAB VI. Mengapa Sistem Pemerintahan Kita Memelihara Populisme dan Patronase 34

6.1. Desain Ketatanegaraan yang Salah 35

6.2. Presiden Terlalu Kuat, Rakyat Terlalu Lemah.....36

6.4. Lembaga Negara Tanpa Keseimbangan ...38

6.5. Konstitusi yang Gagal Mendistribusikan Kedaulatan.....39

BABVII . Populisme, Patronase, dan Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat 40

7.1. Kedaulatan Rakyat dalam Teori vs Praktik 41

7.2. Rakyat sebagai Legitimasi, Bukan Penguasa 41

7.3. Jabatan sebagai Transaksi, Bukan Amanah 42

7.4. Kritik Moral: Ketika Kekuasaan Kehilangan Etika 42

7.5. Perspektif Nilai dan Spiritualitas (Refleksi Qur'ani) 43

BAB VIII. Sekolah Negarawan: Membongkar Akar Masalah, Bukan Gejalanya 44

8.1. Mengapa Populisme Tak Bisa Diperbaiki dengan Ganti Presiden 44

8.2. Kritik terhadap Demokrasi Elektoral 45

8.3. Rakyat Harus Menjadi Pemilik Kedaulatan, Bukan Penonton 46

8.4. Empat Penjaga Kedaulatan Rakyat 47

8.5. MPR sebagai Representasi Nilai, Bukan Arena Partai Politik 48

BAB IX. Jalan Keluar: Mengakhiri Populisme & Patronase melalui Amandemen Konstitusi..50

9.1. Mengapa Amandemen Kelima UUD 1945 Diperlukan 50

9.2. Desain Negara Pelayan Rakyat 51

9.3. Pemerintah sebagai Operator, Bukan Penguasa.....53

9.4. Sistem Pengawasan Berlapis 53

9.5. Demokrasi yang Beradab dan Bertanggung Jawab 54

BAB X. Penutup: Dari Kejahatan Politik ke Politik Kenegarawanan.....56

10.1. Mengakhiri Kejahatan Politik dan Ketergantungan 56

10.2. Melahirkan Negarawan, Bukan Politisi Populis.....57

10.5. Menuju Negara yang Jujur kepada Rakyatnya.....58

Daftar Pustaka 60

Daftar Gambar

Gambar 1. Ilustrasi Demokrasi Meriah, Tapi Kosong 1
Gambar 2. Ilustrasi Populisme sebagai Wajah Baru Kekuasaan Lama 2
Gambar 3. Ilustrasi Patronase Pemerintahan 3
Gambar 4. Ilustrasi Siklus Pemilu Rakyat di Indonesia 5
Gambar 5. Ilustrasi Populisme 7
Gambar 6. Ilustrasi Populisme Kanan vs Populisme Kiri 9
Gambar 7. Infografis Ciri-Ciri Populisme Pemerintah di Negara Berkembang 10
Gambar 8. Infografis Populisme Elektoral 12
Gambar 9. Ilustrasi Populisme 14
Gambar 10. Infografis Patronase vs Korupsi 15
Gambar 11. Infografis Patronase vs Meritokrasi 18
Gambar 12. Ilustrasi Janji Kerakyatan, Imbalan Pemerintah 24
Gambar 13. Ilustrasi Rakyat sebagai Objek Mobilisasi 25
Gambar 14. Ilustrasi Hubungan Oligarki dengan Populisme Rugikan Rakyat 26
Gambar 15. Ilustrasi Puncak Kolaborasi Populisme dan Patronase 27
Gambar 16. Ilustrasi Sistem yang dikendalikan Patronase dan Populisme 29

Gambar 17. Ilustrasi Kondisi Rakyat vs Jaringan Kekuasaan 31
Gambar 18. Ilustrasi Populisme dan Petronase 34
Gambar 19. Dampak dari Desain Ketatanegaraan yang Salah 35
Gambar 20. Ilustrasi Ketimpangan Relasi Kekuasaan. 36
Gambar 21. Ilustrasi DPR sebagai Mitra Kekuasaan, Bukan Pengawas 38
Gambar 22. Ilustrasi Populisme, Patronase, dan Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat 40
Gambar 23. Ilustrasi Sekolah Negarawan Menolak Ilusi "Orang Kuat" 45
Gambar 24. Ilustrasi Alasan Rakyat Harus Menjadi Pemilik Kedaulatan 46
Gambar 25. Ilustrasi Negara Pelayan Rakyat 52
Gambar 26. Ilustrasi Demokrasi Beradan dan Bertanggung Jawab 55

BAB I
Pendahuluan: Demokrasi yang Tampak Meriah, Tapi Kosong



Gambar 1. Ilustrasi Demokrasi Meriah, Tapi Kosong

Demokrasi Indonesia hari ini tampak hidup di permukaan, namun rapuh di dalam. Pemilihan umum berlangsung rutin, pesta kejahatan politik dirayakan dengan gegap gempita, dan jargon "kedaulatan rakyat" diucapkan hampir di setiap pidato pejabat. Namun di balik kemeriahan itu, rakyat justru semakin jauh dari pusat pengambilan keputusan, sementara kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang dan ekonomi.

Fenomena ini menandai sebuah paradoks demokrasi: semakin sering rakyat dipanggil namanya, semakin sedikit kehendaknya diwujudkan. Negara

seolah berjalan atas nama rakyat, tetapi tidak lagi bekerja untuk rakyat.

Bab ini bertujuan membuka kesadaran bahwa krisis demokrasi yang kita alami bukan disebabkan oleh individu-individu yang secara struktural melahirkan populisme menipu dan patronase yang menjerat.

1.1. Populisme sebagai Wajah Baru Kekuasaan Lama

Populisme sering dipersepsikan sebagai kejahatan politik yang berpihak kepada rakyat kecil. Ia hadir dengan bahasa sederhana, simbol-simbol kerakyatan, dan retorika anti-pemerintah. Namun dalam praktiknya, populisme justru kerap menjadi wajah baru dari kekuasaan lama.



Gambar 2. Ilustrasi Populisme sebagai Wajah Baru Kekuasaan Lama

Alih-alih membongkar struktur ketimpangan, populisme hanya mengganti gaya komunikasi kekuasaan. Pemerintah tetap berkuasa, oligarki tetap mengendalikan sumber daya, sementara rakyat dijadikan basis legitimasi emosional. Pemerintahan berubah menjadi pertunjukan: siapa paling dekat dengan rakyat secara simbolik, bukan siapa paling mampu memperbaiki sistem.

Populisme bekerja dengan menyederhanakan persoalan kompleks menjadi narasi hitam-putih. Kritik sistemik dianggap ancaman, sementara loyalitas personal diagungkan. Dalam iklim seperti ini, demokrasi kehilangan fungsi deliberatifnya dan berubah menjadi arena mobilisasi emosi, bukan ruang rasional untuk menentukan masa depan bersama.

1.2. Patronase Pemerintahan: Sistem Tak Terlihat yang Mengikat Negara

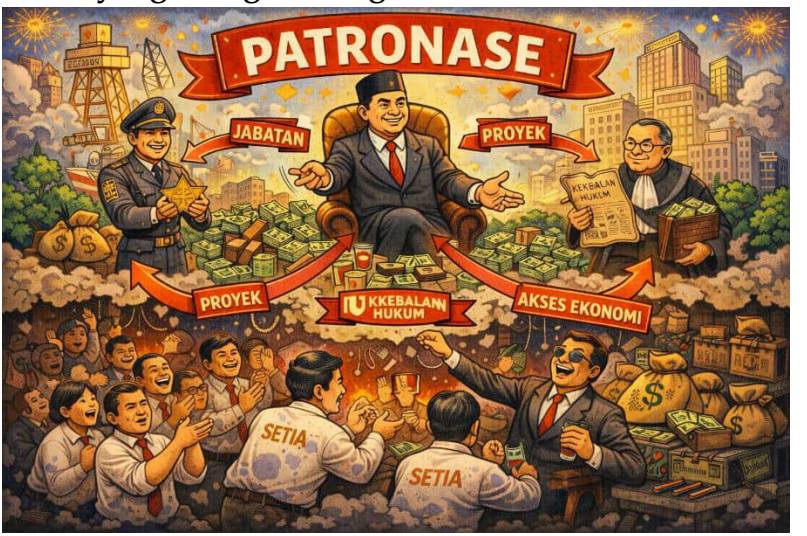

Gambar 3. Ilustrasi Patronase Pemerintahan

Di balik populisme yang riuh, bekerja sebuah sistem sunyi namun sangat efektif: patronase pemerintahan. Patronase adalah relasi kekuasaan berbasis balas jasa, di mana jabatan, proyek, perlindungan hukum, dan akses ekonomi diberikan bukan atas dasar kompetensi, melainkan loyalitas.

Sistem patronase tidak selalu tertulis dalam undang-undang, tetapi mengikat lebih kuat daripada hukum formal. Ia menjalar dari pusat kekuasaan hingga ke birokrasi paling bawah, menciptakan jaringan ketergantungan yang membuat negara sulit bergerak secara rasional dan adil.

Dalam sistem ini, negara bukan lagi institusi pelayanan publik, melainkan ladang distribusi imbalan kejahatan politik. Akibatnya, kebijakan publik tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan rakyat, tetapi untuk menjaga keseimbangan kepentingan para patron dan klien kekuasaan. Patronase menjadikan negara mahal, lamban, dan tidak responsif, sekaligus menutup ruang meritokrasi dan inovasi.

1.3. Rakyat sebagai Sasaran, Bukan Tujuan Politik

Gabungan antara populisme dan patronase menghasilkan situasi yang ironis: rakyat sering disebut, tetapi jarang benar-benar dilibatkan. Rakyat menjadi sasaran politik, bukan tujuan politik.

Dalam setiap siklus pemilu, rakyat diposisikan sebagai objek mobilisasi suara. Janji ditebar, bantuan disalurkan secara selektif, dan identitas dieksploitasi. Namun setelah kekuasaan diraih, partisipasi rakyat berhenti pada bilik suara. Proses legislasi,

penganggaran, dan pengambilan kebijakan strategis kembali tertutup dan eksklufif.



Gambar 4. Ilustrasi Siklus Pemilu Rakyat di Indonesia

Lebih jauh lagi, ketika rakyat mulai kritis dan menuntut akuntabilitas, mereka justru dicurigai, dibungkam, atau dikriminalisasi. Kritik dianggap gangguan stabilitas, bukan bagian dari demokrasi. Di titik ini, demokrasi kehilangan ruhnya: rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai pemilik kedaulatan, melainkan sebagai variabel yang harus dikendalikan.

1.4. Mengapa Populisme dan Patronase Sulit Dilawan

Populisme dan patronase sulit dilawan karena keduanya saling menguatkan. Populisme menyediakan legitimasi moral dan emosional, sementara patronase menyediakan mesin operasional kekuasaan. Bersama-

sama, keduanya menciptakan sistem yang tampak demokratis tetapi sesungguhnya tertutup.

Selain itu, sistem ketatanegaraan yang lemah dalam mekanisme pengawasan dan distribusi kekuasaan membuat praktik ini terus berulang. Kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan, parlemen yang terseret ke dalam kompromi kekuasaan, serta lembaga hukum yang tidak sepenuhnya independen, menciptakan ekosistem yang subur bagi populisme dan patronase.

Dalam kondisi ini, pergantian pemimpin tidak otomatis membawa perubahan. Wajah boleh berganti, tetapi pola tetap sama. Tanpa perubahan desain sistem, demokrasi hanya berputar dalam lingkaran semu.

BAB II
Apa Itu Populisme? Dari Retorika Rakyat ke Alat Kekuasaan

Populisme adalah salah satu istilah yang paling sering digunakan, namun paling jarang dipahami secara utuh. Ia kerap dipuji sebagai suara rakyat, tetapi juga dicurigai sebagai ancaman demokrasi. Di banyak negara berkembang, populisme tampil sebagai harapan perubahan, namun berakhir sebagai alat kekuasaan yang memperkuat pejabat lama. Untuk memahami bagaimana ilusi ini bekerja, kita perlu membedah populisme bukan dari slogan, melainkan dari struktur dan praktiknya.



Gambar 5. Ilustrasi Populisme

2.1. Definisi Populisme: Antara Teori dan Praktik

Secara teoritis, populisme merujuk pada pandangan yang membelah masyarakat ke dalam dua kubu antagonistik: "rakyat yang murni" versus "pejabat yang korup". Dalam narasi ini, politik dianggap sah hanya jika mencerminkan kehendak langsung rakyat, tanpa perantara institusi yang dianggap eksklusif.

Namun dalam praktik, populisme jarang benar-benar memberi kekuasaan pada rakyat. Yang terjadi justru pemusatan kekuasaan pada satu figur, satu kelompok, atau satu jaringan, dengan dalih mewakili kehendak rakyat. Populisme tidak menghapus eksklusifitas pejabat; ia hanya mengganti pejabat lama dengan pejabat baru yang lebih lihai menggunakan bahasa kerakyatan.

Perbedaan mendasar antara teori dan praktik populisme terletak pada relasi kekuasaan. Dalam teori, populisme menjanjikan pembongkaran struktur yang timpang. Dalam praktik, ia sering menghindari perubahan struktural dan memilih jalan pintas simbolik: pidato emosional, kebijakan populer jangka pendek, dan penciptaan musuh bersama.

2.2. Populisme Kiri, Populisme Kanan, dan Populisme Oportunistik

Populisme tidak tunggal. Ia hadir dalam berbagai bentuk, tergantung konteks ideologi dan kepentingan segelintir orang.

Populisme kiri biasanya mengusung isu ketimpangan ekonomi, keadilan sosial, dan perlawanan terhadap kapitalisme atau oligarki. Dalam bentuk ideal,

populisme kiri berupaya memperluas partisipasi dan redistribusi. Namun dalam praktik negara berkembang, ia sering terjebak pada retorika anti-pemerintah tanpa reformasi institusional yang nyata.

Populisme kanan lebih menekankan identitas, nasionalisme sempit, dan penciptaan "musuh internal" seperti kelompok minoritas, imigran, atau oposisi politik. Rakyat dipersatukan bukan melalui keadilan sosial, melainkan melalui ketakutan dan kebencian.



Gambar 6. Ilustrasi Populisme Kanan vs Populisme Kiri

Yang paling dominan di negara berkembang adalah populisme oportunistik: populisme tanpa ideologi. Ia meminjam isu kiri saat berbicara ke rakyat miskin, meminjam isu kanan saat berbicara ke kelompok identitas, dan bersikap pragmatis saat bernegosiasi dengan oligarki. Populisme jenis ini tidak punya komitmen nilai, hanya komitmen kekuasaan.

2.3. Ciri-ciri Populisme Pemerintah di Negara Berkembang



Gambar 7. Infografis Ciri-Ciri Populisme Pemerintah di Negara Berkembang

Populisme di negara berkembang memiliki ciri khas yang membedakannya dari konteks negara maju.

Pertama, personalisasi kekuasaan. Populisme bergantung pada figur kuat yang dikonstruksikan sebagai penyelamat rakyat. Institusi dilemahkan, kritik dipersonalisasi, dan loyalitas diarahkan pada individu, bukan sistem.

Kedua, pelemahan institusi demokrasi. Parlemen, pers, akademisi, dan lembaga hukum diposisikan sebagai penghambat kehendak rakyat. Padahal, merekalah mekanisme pengaman demokrasi.

Ketiga, ketergantungan pada patronase. Populisme membutuhkan jaringan patronase untuk bekerja: bantuan sosial politis, proyek balas jasa, dan distribusi sumber daya berbasis loyalitas. Inilah titik temu populisme dan patronase.

Keempat, anti-kritik dan anti-kompleksitas. Masalah struktural yang rumit disederhanakan menjadi slogan. Kritik dianggap tidak patriotik, tidak pro-rakyat, atau bagian dari pejabat lama.

2.4. Populisme Elektoral: Janji Kejahatan Politik, Emosi, dan Simbol

Dalam arena pemilu, populisme menemukan habitat terbaiknya. Populisme elektoral bekerja melalui tiga instrumen utama: janji, emosi, dan simbol.

Janji dibuat besar, cepat, dan sering kali tidak realistis. Emosi dimobilisasi melalui kemarahan, harapan palsu, atau rasa takut. Simbol-simbol kerakyatan seperti pakaian sederhana, bahasa informal, kunjungan simbolik, dipakai untuk menciptakan kedekatan semu dengan rakyat.



Gambar 8. Infografis Populisme Elektoral

Masalahnya, populisme elektoral jarang disertai peta jalan kebijakan yang rasional. Program jangka

panjang dianggap tidak menarik. Akibatnya, setelah pemilu usai, kebijakan yang diambil sering kali inkonsisten, reaktif, dan tunduk pada kepentingan jangka pendek.

Dalam konteks ini, pemilu tidak lagi menjadi sarana menentukan arah negara, melainkan kompetisi siapa paling piawai mengelola persepsi rakyat.

2.5. Ketika "Atas Nama Rakyat" Menjadi Alibi Kekuasaan

Puncak bahaya populisme terjadi ketika frasa "atas nama rakyat" digunakan sebagai alibi kekuasaan. Segala keputusan dibenarkan karena diklaim mewakili rakyat, meskipun rakyat tidak pernah benar-benar dilibatkan.

"Atas nama rakyat" menjadi tameng untuk membungkam kritik, melemahkan oposisi, dan mengabaikan prosedur akuntabilitas. Demokrasi direduksi menjadi klaim moral sepihak, bukan proses kolektif yang dapat diuji dan dikoreksi.

Di titik inilah populisme berbalik arah: dari alat yang mengatasnamakan rakyat, menjadi mekanisme yang menjauhkan rakyat dari kedaulatannya sendiri. Rakyat tidak lagi menjadi subjek demokrasi, melainkan legitimasi pasif bagi kekuasaan yang semakin terkonsentrasi.

BAB III
Patronase Pemerintahan: Jaring Kekuasaan yang Menjerat Negara



Gambar 9. Ilustrasi Populisme

Jika populisme adalah wajah yang tampak di permukaan, maka patronase adalah mesin yang bekerja di balik layar. Ia tidak berpidato, tidak berkampanye, dan tidak membutuhkan legitimasi moral di ruang publik. Namun justru patronase inilah yang menentukan siapa berkuasa, siapa mendapat akses sumber daya, dan siapa tersingkir dari sistem. Tanpa memahami patronase, kritik terhadap demokrasi hanya akan berhenti pada gejala, bukan akar masalah.

Bab ini membongkar patronase sebagai sistem kekuasaan yang nyata, yang mengikat negara, melemahkan meritokrasi, dan menjadikan demokrasi sekadar prosedur formal.

3.1. Apa Itu Patronase Pemerintahan



Gambar 10. Infografis Patronase vs Korupsi

Patronase pemerintahan adalah sistem relasi kekuasaan berbasis balas jasa, di mana akses terhadap jabatan, proyek, perlindungan hukum, dan sumber daya negara diberikan sebagai imbalan atas loyalitas pemerintahan, bukan atas dasar kompetensi atau kepentingan publik.

Berbeda dengan korupsi yang bersifat ilegal dan individual, patronase sering kali bekerja dalam wilayah abu-abu yang legal secara formal, tetapi merusak secara struktural. Ia tidak selalu melanggar hukum tertulis, namun melanggar prinsip keadilan dan kepantasan. Patronase menjadikan negara sebagai alat distribusi keuntungan pemerintah, bukan sebagai institusi pelayanan publik.

Dalam sistem patronase, kekuasaan tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai investasi. Jabatan adalah aset, kebijakan adalah instrumen balas jasa, dan anggaran publik adalah sumber pembiayaan loyalitas. Negara berubah dari res publica menjadi res patrona milik jejaring patron.

3.2. Hubungan Patron–Klien dalam Negara Modern

Hubungan patron–klien adalah inti dari patronase. Patron adalah aktor kekuasaan, seperti politisi, pejabat tinggi, atau pengusaha yang memiliki akses terhadap sumber daya negara. Klien adalah individu atau kelompok yang bergantung pada patron untuk memperoleh jabatan, perlindungan, atau keuntungan ekonomi.



Dalam negara modern, hubungan ini jarang bersifat personal seperti dalam masyarakat feodal. Ia tampil dalam bentuk yang lebih rapi dan terinstitusionalisasi: koalisi partai politik, tim sukses, jaringan relawan, organisasi sayap, hingga perusahaan mitra negara. Loyalitas dibungkus profesionalisme, dan ketergantungan dibungkus prosedur.

Namun substansinya sama: klien tidak bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada patron. Akuntabilitas publik tergeser oleh loyalitas internal. Dalam kondisi ini, negara tidak lagi dikendalikan oleh hukum dan kepentingan umum, tetapi oleh kesetiaan dalam jaringan kekuasaan.

Hubungan patron–klien inilah yang menjelaskan mengapa banyak kebijakan publik tidak rasional, mengapa pejabat yang gagal tetap dipertahankan, dan mengapa kritik internal sulit berkembang. Sistem ini menciptakan stabilitas semu, tetapi menghancurkan kualitas pemerintahan dari dalam.

3.3. Patronase vs Meritokrasi



Gambar 11. Infografis Patronase vs Meritokrasi

Meritokrasi adalah prinsip bahwa posisi dan tanggung jawab diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja. Patronase adalah antitesisnya. Dalam sistem patronase, kemampuan kalah oleh kedekatan, dan integritas kalah oleh loyalitas.

Akibatnya, negara kehilangan sumber daya manusia terbaiknya. Mereka yang kompeten tetapi tidak memiliki "orang dalam" tersingkir atau stagnan. Sebaliknya, mereka yang setia tetapi tidak cakap naik ke posisi strategis. Dalam jangka panjang, negara menjadi tidak cerdas, tidak adaptif, dan tidak mampu merespons krisis secara efektif.

Lebih berbahaya lagi, patronase menciptakan budaya oportunisme. Aparat negara belajar bahwa prestasi tidak sepenting relasi, dan kinerja tidak sepenting kesetiaan. Ini bukan sekadar masalah etika individu, melainkan kerusakan budaya birokrasi yang sistemik.

3.4. Patronase dalam Rekrutmen Pejabat dan Birokrasi

Patronase paling nyata terlihat dalam proses rekrutmen di pemerintahan. Kandidat pejabat dipilih bukan karena kapasitas kenegarawanan, melainkan karena kemampuan mobilisasi suara dan dana. Pejabat birokrasi diangkat bukan karena keahlian teknis, melainkan karena "jasa" atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Rekrutmen semacam ini menciptakan lingkaran setan. Pejabat yang diangkat melalui patronase akan merasa berutang pada patronnya, bukan pada rakyat.

Untuk membayar utang itu, ia akan menggunakan jabatannya sebagai alat balas jasa lanjutan untuk memperluas jaringan patronase ke tingkat yang lebih rendah.

Dengan demikian, patronase mereproduksi dirinya sendiri. Ia menular dari atas ke bawah, dari pusat ke daerah. Negara berubah menjadi jaringan kepentingan yang saling mengikat, sulit dibongkar, dan kebal terhadap kritik.

3.5. Mengapa Patronase Membuat Negara Tidak Efisien dan Tidak Adil

Patronase membuat negara tidak efisien karena keputusan tidak diambil berdasarkan kebutuhan objektif, melainkan kompromi kepentingan. Proyek dipilih bukan karena paling dibutuhkan, tetapi karena paling menguntungkan jaringan. Anggaran membengkak, kualitas rendah, dan hasil minim.

Patronase juga membuat negara tidak adil. Akses terhadap keadilan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi menjadi timpang. Mereka yang berada dalam jaringan mendapat perlakuan istimewa, sementara rakyat biasa harus berhadapan dengan prosedur kaku dan pelayanan buruk. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bukan karena hukum itu sendiri, tetapi karena sistem patronase mengintervensinya.

Dalam kondisi ini, demokrasi kehilangan maknanya. Pemilu tetap berlangsung, tetapi hanya berfungsi sebagai gerbang awal untuk menentukan patron mana yang akan menguasai negara. Setelah itu,

roda kekuasaan berputar di ruang tertutup, jauh dari kontrol rakyat.

BAB IV
Kolaborasi Berbahaya: Populisme + Patronase = Demokrasi Palsu

Jika populisme adalah bahasa kekuasaan, dan patronase adalah mesinnya, maka kolaborasi keduanya adalah sistem pemerintahan yang paling berbahaya bagi demokrasi. Populisme bekerja di ruang terang, seperti pidato, kampanye, simbol, dan emosi publik. Patronase bekerja di ruang gelap, seperti transaksi, balas jasa, dan jaringan kepentingan. Ketika keduanya bertemu, demokrasi berubah menjadi panggung sandiwara: tampak hidup, tetapi kehilangan kedaulatan.

Bab ini adalah inti kritik buku ini. Di sinilah terlihat bagaimana demokrasi yang tampak meriah sesungguhnya dikendalikan oleh relasi kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.

4.1. Populisme sebagai Topeng Patronase

Populisme sering tampil sebagai gerakan anti-pemerintah. Ia menyerang "oligarki" dan "penguasa korup". Namun dalam praktik, populisme justru menjadi topeng yang menutupi kerja patronase di belakangnya. Bahasa kerakyatan digunakan untuk meraih dukungan publik, sementara kesepakatan kekuasaan dilakukan secara eksklusif dan tertutup.

Topeng ini efektif karena publik diarahkan untuk melihat konflik semu di permukaan, bukan transaksi nyata di balik layar. Rakyat disuguhi narasi perjuangan,

sementara distribusi jabatan, proyek, dan perlindungan hukum berjalan mengikuti logika patron–klien. Populisme mengalihkan perhatian dari struktur, sehingga patronase dapat bekerja tanpa sorotan.



Dalam kondisi ini, kritik terhadap patronase sering dilemahkan dengan tuduhan anti-rakyat. Siapa pun yang mempertanyakan kebijakan atau konsistensi kekuasaan dicap sebagai bagian dari pejabat lama, penghambat perubahan, atau musuh rakyat. Populisme tidak menghapus patronase, ia melindunginya.

4.2. Janji Kerakyatan, Imbalan Pemerintah

Ciri paling kentara dari kolaborasi ini adalah jurang antara janji dan praktik. Di ruang publik, rakyat dijanjikan kesejahteraan, keadilan, dan perubahan cepat. Di ruang kekuasaan, yang terjadi adalah

pembagian imbalan pejabat kepada jaringan pendukung.



Gambar 12. Ilustrasi Janji Kerakyatan, Imbalan Pemerintah

Janji kerakyatan berfungsi sebagai mata uang elektoral. Setelah kekuasaan diraih, mata uang itu ditukar dengan kewajiban membayar "utang": jabatan untuk loyalis, proyek untuk penyokong dana, dan kebijakan yang menguntungkan koalisi. Negara menjadi arena pelunasan janji pejabat, bukan pemenuhan janji kepada rakyat.

Akibatnya, kebijakan publik sering kali tidak rasional. Program disusun untuk kepentingan jangka pendek dan citra, bukan berdasarkan kebutuhan objektif. Ketika janji tidak terpenuhi, kegagalan ditutupi dengan narasi baru, musuh baru, atau alasan teknis. Rakyat terus diberi harapan, sementara struktur ketidakadilan tetap utuh.

4.3. Rakyat sebagai Objek Mobilisasi

Dalam demokrasi palsu, rakyat tidak lagi menjadi subjek pemerintah, melainkan objek mobilisasi. Mereka digerakkan untuk memilih, mendukung, dan membela, tetapi tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Partisipasi dibatasi pada momentum elektoral, bukan proses pengambilan keputusan.

Mobilisasi ini bersifat emosional, bukan rasional. Identitas, sentimen, dan ketakutan dimanfaatkan untuk menjaga loyalitas. Rakyat tidak diajak memahami kompleksitas masalah, melainkan disuguhi narasi sederhana yang mudah dikonsumsi. Dalam kondisi ini, kesadaran politik tidak tumbuh; yang berkembang adalah ketergantungan.



Gambar 13. Ilustrasi Rakyat sebagai Objek Mobilisasi

Ketika rakyat mencoba melampaui peran objek, menjadi kritis dan menuntut akuntabilitas justru

respons sistem cenderung defensif. Kritik dipersempit sebagai provokasi, aspirasi dilabeli sebagai gangguan stabilitas. Demokrasi tetap berjalan, tetapi ruang partisipasinya menyempit.

4.4. Mengapa Oligarki Menyukai Populisme



Gambar 14. Ilustrasi Hubungan Oligarki dengan Populisme Rugikan Rakyat

Oligarki menyukai populisme bukan karena keberpihakan pada rakyat, melainkan karena efisiensinya. Populisme memberikan legitimasi cepat dengan biaya kampanye yang relatif murah. Selama figur populis mampu mengendalikan opini publik, oligarki dapat bekerja di balik layar tanpa perlu membangun akuntabilitas institusional.

Populisme juga membantu oligarki menghindari reformasi struktural. Dengan fokus pada figur dan simbol, perhatian publik dialihkan dari isu distribusi kekuasaan dan sumber daya. Kritik terhadap

ketimpangan struktural diredam oleh narasi loyalitas dan konflik identitas.

Dalam kolaborasi ini, oligarki menyediakan sumber daya, seperti dana, media, dan jaringan. Sementara, populisme menyediakan legitimasi massa. Keduanya saling membutuhkan. Demokrasi menjadi alat, bukan tujuan.

4.5. Demokrasi Tanpa Kontrol dan Tanpa Akuntabilitas



Gambar 15. Ilustrasi Puncak Kolaborasi Populisme dan Patronase

Puncak dari kolaborasi populisme dan patronase adalah demokrasi tanpa kontrol dan tanpa akuntabilitas. Mekanisme pengawasan dilemahkan, lembaga perwakilan terseret ke dalam kompromi kekuasaan, dan hukum kehilangan daya korektifnya.

Kekuasaan mengklaim legitimasi langsung dari rakyat, sehingga merasa tidak perlu dikontrol. Padahal klaim ini tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang nyata. Akuntabilitas diganti dengan popularitas, dan kebenaran diganti dengan persepsi.

Demokrasi semacam ini rapuh. Ia bergantung pada emosi massa dan stabilitas jaringan patronase. Ketika emosi berubah atau jaringan retak, krisis mudah terjadi. Negara tidak memiliki fondasi institusional yang kuat untuk menyerap konflik dan melakukan koreksi.

BAB V
Dampak Nyata: Negara Salah Kelola, Rakyat Menanggung Akibat

Kolaborasi populisme dan patronase tidak berhenti pada manipulasi wacana dan transaksi segelintir orang. Dampaknya menjalar langsung ke tata kelola negara dan kehidupan rakyat. Negara menjadi salah kelola, sementara biaya sosial, ekonomi, dan hukum ditanggung oleh warga negara, terutama mereka yang paling lemah posisinya. Bab ini memaparkan dampak nyata tersebut, satu per satu.



Gambar 16. Ilustrasi Sistem yang dikendalikan Patronase dan Populisme

5.1. Kebijakan Publik yang Tidak Rasional

Dalam sistem yang dikendalikan patronase dan dipoles populisme, kebijakan publik jarang lahir dari analisis kebutuhan objektif. Kebijakan disusun untuk

memenuhi kepentingan koalisi, membayar utang kampanye, atau mempertahankan citra populis, bukan untuk memecahkan masalah secara berkelanjutan.

Akibatnya, kebijakan sering inkonsisten, reaktif, dan tambal sulam. Program diluncurkan dengan gegap gempita, tetapi tanpa perencanaan matang dan indikator keberhasilan yang jelas. Ketika gagal, evaluasi diganti dengan narasi pembenaran. Negara tampak aktif, tetapi tidak efektif. Rakyat dihadapkan pada kebijakan yang berubah-ubah, membingungkan, dan sering kali tidak menjawab persoalan dasar mereka.

Ketidakrasionalan ini bukan kesalahan teknis semata, melainkan konsekuensi sistemik dari pengambilan keputusan yang dikunci oleh kepentingan patronase dan tekanan populisme elektoral..

5.2. Korupsi Struktural, Bukan Sekadar Moral Individu

Korupsi dalam sistem patronase bukan anomali, melainkan keniscayaan. Ia tidak selalu muncul sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai pola struktural yang dilembagakan. Ketika jabatan diperoleh melalui balas jasa, maka jabatan itu diperlakukan sebagai aset yang harus "dikembalikan modalnya".

Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi sekadar persoalan moral individu, tetapi bagian dari mekanisme pembiayaan kekuasaan. Proyek dimark-up, kebijakan diperdagangkan, dan penegakan hukum dinegosiasikan. Bahkan ketika tidak ada pelanggaran hukum yang jelas, praktik ini tetap merusak karena

mengalihkan sumber daya publik dari kepentingan rakyat ke kepentingan jaringan.

Penindakan hukum yang bersifat selektif semakin memperparah keadaan. Korupsi kecil ditindak, sementara korupsi besar yang terhubung dengan patronase kuat sulit disentuh. Negara kehilangan wibawa moralnya, dan hukum kehilangan daya cegahnya.



Gambar 17. Ilustrasi Kondisi Rakyat vs Jaringan Kekuasaan

5.3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Salah kelola negara berdampak langsung pada ketimpangan. Ketika kebijakan dan sumber daya dikendalikan oleh jaringan patronase, akses menjadi tidak merata. Mereka yang berada dekat dengan pusat kekuasaan memperoleh kemudahan, sementara rakyat di luar jaringan menghadapi birokrasi berbelit dan peluang yang sempit.

Populisme sering menutupi ketimpangan ini dengan bantuan sosial simbolik atau program jangka pendek. Namun tanpa perubahan struktural, ketimpangan terus melebar. Kekayaan terkonsentrasi, mobilitas sosial tersumbat, dan ketidakadilan diwariskan antargenerasi.

Ketimpangan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan politik. Rakyat yang terpinggirkan kehilangan daya tawar, sementara segelintir orang yang diuntungkan semakin mampu mengamankan posisinya. Demokrasi berubah menjadi arena yang timpang sejak awal.

5.4. Kriminalisasi Kritik dan Represi Hukum

Ketika negara salah kelola dan kehilangan legitimasi substantif, kritik menjadi ancaman. Dalam sistem populis-patronase, kritik tidak dilihat sebagai mekanisme koreksi, melainkan sebagai gangguan stabilitas atau serangan terhadap "kehendak rakyat".

Hukum kemudian digunakan secara represif: pasal karet, penegakan selektif, dan intimidasi legal menjadi alat untuk membungkam suara kritis. Aktivis, jurnalis, akademisi, dan warga biasa yang bersuara berhadapan dengan risiko hukum yang tidak proporsional. Ruang demokrasi menyempit, bukan karena tidak ada kebebasan formal, tetapi karena ada ketakutan nyata.

Kriminalisasi kritik adalah tanda negara yang defensif. Ia menandakan kegagalan negara menjawab persoalan secara substantif, sehingga memilih jalan pintas penertiban.

5.5. Negara yang Tak Lagi Melindungi Rakyat

Puncak dari semua dampak ini adalah berubahnya fungsi negara. Negara yang seharusnya melindungi rakyat justru melindungi jaringan kekuasaan. Aparat lebih sigap menjaga kepentingan segelintir orang daripada memastikan keadilan bagi warga. Kebijakan lebih cepat menyelamatkan stabilitas pemerintahan daripada keselamatan sosial.

Dalam kondisi ini, rakyat dibiarkan menghadapi risiko sendiri, mulai dari risiko ekonomi, hukum, hingga sosial tanpa perlindungan yang memadai. Negara hadir sebagai pengatur dan penertib, tetapi absen sebagai pelindung. Kontrak sosial melemah, dan kepercayaan publik runtuh secara perlahan.

BAB VI
Mengapa Sistem Pemerintahan Kita Memelihara Populisme dan Patronase



Gambar 18. Ilustrasi Populisme dan Petronase

Populisme dan patronase sering diperlakukan sebagai penyakit perilaku: kesalahan politisi, lemahnya etika pejabat, atau rendahnya kualitas moral individu. Pandangan ini menenangkan, tetapi menyesatkan. Ia mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendasar: desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang justru memelihara, bahkan membutuhkan, populisme dan patronase agar dapat terus berjalan.

Bab ini menegaskan bahwa selama struktur konstitusional tidak diubah, pergantian aktor tidak

akan menghasilkan perubahan substantif. Wajah boleh berganti, tetapi pola akan tetap sama.

6.1. Desain Ketatanegaraan yang Salah

Sistem pemerintahan tidak netral. Ia membentuk insentif, perilaku, dan orientasi kekuasaan. Ketika desain ketatanegaraan memberi ruang besar pada konsentrasi kekuasaan, minim distribusi kedaulatan, dan lemah dalam mekanisme koreksi, maka populisme dan patronase menjadi strategi rasional. Bukan penyimpangan.



Gambar 19. Dampak dari Desain Ketatanegaraan yang Salah

Desain yang salah bukan berarti tidak demokratis secara formal, tetapi demokratis secara prosedural tanpa fondasi substantif. Pemilu diselenggarakan, lembaga dibentuk, dan hukum ditegakkan, namun semua itu tidak diarahkan untuk

memastikan rakyat benar-benar berdaulat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam sistem semacam ini, politisi yang ingin bertahan hidup tidak akan memilih jalur meritokrasi dan akuntabilitas yang mahal dan berisiko. Mereka akan memilih populisme untuk meraih legitimasi cepat, dan patronase untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Sistem mendorongnya ke sana.

6.2. Presiden Terlalu Kuat, Rakyat Terlalu Lemah



Gambar 20. Ilustrasi Ketimpangan Relasi Kekuasaan

Salah satu sumber utama populisme dan patronase adalah ketimpangan relasi kekuasaan antara presiden dan rakyat. Presiden dipilih langsung dan diberi legitimasi elektoral yang sangat kuat, tetapi rakyat tidak memiliki instrumen konstitusional yang

sepadan untuk mengontrol kekuasaan tersebut di antara pemilu.

Klaim "mandat rakyat" kemudian menjadi sumber legitimasi yang hampir tak tertandingi. Presiden dapat berbicara atas nama rakyat, tanpa mekanisme yang memungkinkan rakyat secara nyata menarik, mengoreksi, atau mengarahkan mandat tersebut. Dalam kondisi ini, populisme menjadi senjata pemerintah yang ampuh, dan patronase menjadi alat pengelolaan kekuasaan yang efektif.

Rakyat kuat saat memilih, tetapi lemah setelahnya. Demokrasi berhenti di bilik suara, bukan berlanjut dalam tata kelola negara.

6.3. DPR sebagai Mitra Kekuasaan, Bukan Pengawas

Dalam teori demokrasi, parlemen adalah pengawas eksekutif. Namun dalam praktik sistem pemerintah kita, DPR lebih sering berfungsi sebagai mitra kekuasaan, bukan penyeimbangnya. Koalisi gemuk, jabatan transaksional, dan bagi-bagi jabatan membuat fungsi pengawasan melemah secara struktural.

DPR tidak kehilangan kewenangan secara hukum, tetapi kehilangan insentif untuk menggunakannya secara tegas. Kritik berisiko merusak kompromi, sementara pengawasan yang keras dapat mengganggu aliran patronase. Akibatnya, fungsi legislasi dan pengawasan sering tunduk pada logika stabilitas kekuasaan, bukan kepentingan rakyat.

Dalam situasi ini, tidak ada lembaga representatif yang benar-benar berdiri sebagai penyalur kedaulatan rakyat. DPR menjadi bagian dari masalah, bukan solusi.



Gambar 21. Ilustrasi DPR sebagai Mitra Kekuasaan, Bukan Pengawas

6.4. Lembaga Negara Tanpa Keseimbangan

Selain DPR, lembaga-lembaga negara lainnya juga berada dalam posisi yang tidak seimbang. Sebagian terlalu lemah, sebagian terlalu tergantung, dan sebagian kehilangan legitimasi publik. Sistem checks and balances bekerja secara formal, tetapi lumpuh secara politik.

Ketika lembaga pengawas bergantung pada kekuasaan yang diawasinya baik melalui mekanisme, anggaran, maupun rekrutmen, maka pengawasan berubah menjadi formalitas. Keseimbangan kekuasaan runtuh bukan karena pelanggaran terang-terangan,

melainkan karena relasi saling ketergantungan yang terlalu dalam.

Dalam kondisi ini, patronase menjadi perekat antarlembaga, sementara populisme menjadi tameng legitimasi di hadapan publik.

6.5. Konstitusi yang Gagal Mendistribusikan Kedaulatan

Masalah paling mendasar terletak pada konstitusi yang gagal mendistribusikan kedaulatan rakyat secara nyata. Kedaulatan diakui secara normatif, tetapi tidak dioperasionalkan dalam struktur kelembagaan yang memungkinkan rakyat hadir secara berkelanjutan dalam pengambilan keputusan.

Tidak ada institusi yang benar-benar mewakili kedaulatan rakyat sebagai pusat kekuasaan tertinggi. Yang ada adalah lembaga-lembaga kekuasaan yang saling bernegosiasi, sementara rakyat berada di luar meja. Dalam ruang kosong inilah populisme dan patronase tumbuh subur.

Populisme mengisi kekosongan representasi dengan klaim moral sepihak. Patronase mengisi kekosongan kontrol dengan jaringan loyalitas. Keduanya bukan anomali, melainkan adaptasi rasional terhadap desain konstitusional yang timpang.

BAB VII
Populisme, Patronase, dan Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat

Jika populisme adalah ilusi demokrasi, dan patronase adalah mesin kekuasaan, maka akibat akhirnya adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Pengkhianatan ini tidak selalu tampak sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai pengosongan makna: kedaulatan diakui dalam kata-kata, namun ditiadakan dalam praktik. Bab ini membawa kritik ke wilayah yang lebih dalam tentang wilayah nilai, etika, dan tanggung jawab moral kekuasaan.



Gambar 22. Ilustrasi Populisme, Patronase, dan Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat

7.1. Kedaulatan Rakyat dalam Teori vs Praktik

Dalam teori demokrasi, kedaulatan rakyat berarti rakyat adalah sumber, pemilik, dan pengendali kekuasaan. Kekuasaan dijalankan atas mandat rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan dapat dikoreksi oleh rakyat. Namun dalam praktik pemerintah populis-patronase, kedaulatan ini berhenti sebagai konsep normatif.

Rakyat memang memilih, tetapi tidak mengendalikan. Rakyat memang disebut, tetapi tidak dihadirkan. Kedaulatan direduksi menjadi momen elektoral lima tahunan, bukan proses berkelanjutan. Setelah suara diberikan, kekuasaan bergerak di ruang tertutup, dikelola oleh segelintir orang, dinegosiasikan oleh patron, dan dijaga oleh loyalitas jaringan.

Perbedaan inilah yang menandai pengkhianatan: kedaulatan diakui dalam teori, tetapi ditiadakan dalam praktik.

7.2. Rakyat sebagai Legitimasi, Bukan Penguasa

Dalam sistem yang dikuasai populisme dan patronase, rakyat diperlakukan bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai sumber legitimasi. Kehadiran rakyat dibutuhkan untuk memenangkan pemilu, membenarkan kebijakan, dan membungkam kritik bukan untuk menentukan arah negara.

"Atas nama rakyat" menjadi frasa sakral yang tidak dapat digugat, meskipun rakyat tidak pernah diajak bermusyawarah secara sungguh-sungguh. Kekuasaan mengklaim mewakili rakyat, tetapi tidak

membuka ruang bagi rakyat untuk menarik mandat, menilai kinerja, atau mengoreksi kebijakan secara nyata.

Dalam kondisi ini, rakyat direduksi menjadi simbol moral, bukan subjek politik. Demokrasi berubah menjadi ritual legitimasi, bukan sistem kedaulatan.

7.3. Jabatan sebagai Transaksi, Bukan Amanah

Jabatan pemerintah tidak lagi dipahami sebagai amanah tugas untuk mengelola kepentingan bersama, melainkan sebagai transaksi kekuasaan.

Jabatan diperoleh melalui negosiasi, dipertahankan melalui kompromi, dan digunakan untuk membayar utang kampanye. Amanah berubah menjadi investasi. Pelayanan publik berubah menjadi komoditas. Negara berubah menjadi arena distribusi balas jasa.

Dalam kerangka ini, tidak mengherankan jika kepentingan rakyat selalu kalah oleh kepentingan jaringan. Jabatan yang transaksional tidak mengenal kesetiaan pada nilai, hanya kesetiaan pada kesepakatan. Inilah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi namun paling merusak.

7.4. Kritik Moral: Ketika Kekuasaan Kehilangan Etika

Ketika hukum masih berdiri tetapi keadilan menghilang, persoalannya bukan lagi legalitas, melainkan etika. Kekuasaan yang sah secara prosedural dapat tetap tidak bermoral secara substantif. Inilah wilayah kritik moral.

Kekuasaan yang kehilangan etika akan selalu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kritik dianggap ancaman. Koreksi dianggap pembangkangan. Dalam kondisi ini, negara menjadi defensif dan masyarakat menjadi apatis.

Kritik moral diperlukan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa etika adalah kekuasaan yang berbahaya bagi rakyat, bagi negara, dan bagi masa depan.

7.5. Perspektif Nilai dan Spiritualitas (Refleksi Qur'ani)

Dalam perspektif nilai dan spiritualitas, kekuasaan bukan hak, melainkan amanah. Amanah menuntut pertanggungjawaban, bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada nilai kebenaran yang lebih tinggi.

Al-Qur'an mengingatkan bahwa amanah harus diserahkan kepada yang berhak dan dijalankan dengan adil. Ketika kekuasaan dijalankan untuk kepentingan sempit, ketika rakyat diperalat atas nama legitimasi, dan ketika keadilan dikorbankan demi stabilitas, maka yang terjadi bukan sekadar kegagalan pemerintah, melainkan pengkhianatan amanah.

Spiritualitas di sini bukan simbol keagamaan, melainkan kesadaran batas: bahwa kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan sejarah, di hadapan rakyat, dan di hadapan Tuhan.

BAB VIII
Sekolah Negarawan: Membongkar Akar Masalah, Bukan Gejalanya

Kritik terhadap populisme dan patronase akan selalu berakhir buntu jika berhenti pada pergantian figur. Wajah boleh berubah, gaya boleh berbeda, tetapi sistem yang sama akan terus melahirkan pola yang sama. Karena itu, jalan keluar tidak cukup dengan reformasi elektoral atau perbaikan teknis tata kelola. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara berpikir tentang negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat. Di titik inilah gagasan Sekolah Negarawan menemukan relevansinya.

8.1. Mengapa Populisme Tak Bisa Diperbaiki dengan Ganti Presiden

Populisme bukan kesalahan individu presiden; ia adalah strategi rasional dalam sistem yang timpang. Selama desain negara memberi insentif pada pencitraan, mobilisasi emosi, dan klaim legitimasi sepihak, siapa pun yang ingin berkuasa akan terdorong menggunakan populisme.

Mengganti presiden tanpa mengubah sistem hanya memindahkan peran, dari satu aktor ke aktor lain, tanpa mengubah panggungnya. Bahkan pemimpin yang berniat baik akan terseret oleh tuntutan elektoral, koalisi transaksional, dan kebutuhan menjaga stabilitas

kekuasaan. Populisme, dalam konteks ini, bukan anomali, melainkan adaptasi.

Sekolah Negarawan menolak ilusi "orang kuat" sebagai solusi. Ia menekankan bahwa negara yang sehat membutuhkan sistem yang menumbuhkan kepemimpinan beretika, bukan ketergantungan pada figur.



Gambar 23. Ilustrasi Sekolah Negarawan Menolak Ilusi "Orang Kuat"

8.2. Kritik terhadap Demokrasi Elektoral

Demokrasi elektoral telah direduksi menjadi mekanisme kompetisi suara, bukan mekanisme kedaulatan. Pemilu menjadi tujuan, bukan sarana. Legitimasi pemerintah berhenti pada hasil pemilihan, sementara partisipasi rakyat setelahnya menyempit drastis.

Sekolah Negarawan tidak menolak pemilu, tetapi mengkritik pemilu yang berdiri sendiri tanpa arsitektur kedaulatan. Demokrasi yang hanya elektoral mudah dikuasai oleh modal, jaringan patronase, dan teknik manipulasi opini. Dalam kondisi ini, rakyat memilih, tetapi tidak memerintah.

Kritik ini mengarah pada kebutuhan untuk melengkapi demokrasi elektoral dengan demokrasi kedaulatan, di mana rakyat hadir bukan hanya saat memilih, tetapi juga dalam pengawasan, koreksi, dan penentuan arah negara.

8.3. Rakyat Harus Menjadi Pemilik Kedaulatan, Bukan Penonton



Gambar 24. Ilustrasi Alasan Rakyat Harus Menjadi Pemilik Kedaulatan

Masalah paling mendasar dalam sistem saat ini adalah posisi rakyat yang direduksi menjadi penonton. Rakyat menyaksikan pertarungan pejabat, menerima

dampak kebijakan, tetapi tidak memiliki instrumen konstitusional untuk mengoreksi kekuasaan secara bermakna.

Sekolah Negarawan menegaskan bahwa rakyat harus kembali menjadi pemilik kedaulatan, bukan sekadar sumber legitimasi. Kepemilikan ini bukan simbolik, melainkan struktural. Tercermin dalam lembaga, mekanisme, dan proses pengambilan keputusan.

Menjadi pemilik berarti memiliki hak untuk:

- mengawasi secara efektif,
- mengoreksi tanpa kriminalisasi,
- dan memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor nilai dan tujuan negara.

Tanpa reposisi ini, demokrasi akan terus berjalan tanpa rakyat.

8.4. Empat Penjaga Kedaulatan Rakyat

Sekolah Negarawan memandang kedaulatan rakyat sebagai ekosistem nilai yang dijaga oleh empat unsur utama, bukan sebagai perebutan kekuasaan tunggal:

1. Kaum Intelektual

   Penjaga nalar negara. Bertugas merumuskan kebijakan berbasis pengetahuan, membaca realitas secara jernih, dan mencegah penyederhanaan populis atas persoalan kompleks.

2. Kaum Rohaniawan

   Penjaga nurani dan etika. Mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak; dan

bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama stabilitas.

3. Kaum Budayawan

   Penjaga rasa, identitas, dan kepantasan. Menjadi sistem saraf bangsa yang peka terhadap penderitaan rakyat, serta cermin moral bagi kekuasaan.

4. TNI–Polri

   Penjaga kedaulatan fisik dan keamanan. Berfungsi melindungi negara dan rakyat, bukan menjadi alat pemerintah atau dominasi kekuasaan.

Keempat penjaga ini bukan aktor kejahatan politik, melainkan penopang kedaulatan yang saling mengimbangi. Kedaulatan runtuh ketika satu unsur mendominasi atau ketika keseimbangan ini diabaikan.

8.5. MPR sebagai Representasi Nilai, Bukan Arena Partai Politik

Dalam kerangka Sekolah Negarawan, diperlukan satu institusi yang benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagai nilai, bukan sebagai kepentingan elektoral. Di sinilah gagasan MPR sebagai majelis amanah menemukan tempatnya.

MPR tidak diposisikan sebagai perpanjangan DPR atau arena kompromi partai, melainkan sebagai:

- penjaga arah negara,
- pengawal tujuan bernegara,
- dan pengimbang kekuasaan eksekutif.

MPR yang berfungsi sebagai representasi nilai akan mampu:

- mengoreksi penyimpangan konstitusional,
- menjaga agar kekuasaan tetap dalam koridor tujuan negara,
- dan menjadi ruang kehadiran kedaulatan rakyat yang berkelanjutan.

BAB IX
Jalan Keluar: Mengakhiri Populisme & Patronase melalui Amandemen Konstitusi

Kritik tanpa jalan keluar hanya melahirkan kemarahan. Jalan keluar tanpa kritik hanya melahirkan pengulangan. Setelah membongkar populisme sebagai ilusi dan patronase sebagai mesin kekuasaan, bab ini menegaskan bahwa solusi yang layak bukanlah revolusi yang meruntuhkan negara, melainkan amandemen konstitusi yang menata ulang distribusi kedaulatan rakyat. Inilah jalan keluar yang beradab, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

9.1. Mengapa Amandemen Kelima UUD 1945 Diperlukan

Populisme dan patronase tidak tumbuh di ruang hampa. Keduanya berakar pada desain konstitusional yang gagal mengoperasionalkan kedaulatan rakyat secara nyata. Amandemen sebelumnya telah memperbaiki banyak hal, tetapi juga meninggalkan kekosongan mendasar: tidak adanya lembaga atau mekanisme yang benar-benar mewakili dan menjalankan kedaulatan rakyat secara berkelanjutan.

Akibatnya, kedaulatan direduksi menjadi legitimasi elektoral, bukan kendali substantif. Kekuasaan eksekutif menjadi terlalu kuat, sementara rakyat kehilangan instrumen koreksi di luar pemilu. Dalam ruang kosong inilah populisme mengklaim suara

rakyat secara sepihak, dan patronase mengikat kekuasaan secara tertutup.

Amandemen Kelima diperlukan bukan untuk mengkhianati reformasi, tetapi untuk menyempurnakannya, mengembalikan ruh kedaulatan rakyat agar tidak lagi diperalat sebagai slogan, melainkan hadir sebagai struktur.

9.2. Desain Negara Pelayan Rakyat

Negara harus didesain ulang sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat. Ini bukan slogan moral, melainkan prinsip arsitektur ketatanegaraan. Negara pelayan berarti seluruh kekuasaan publik bekerja berdasarkan mandat, batas, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada rakyat.

Dalam desain ini:

- rakyat diposisikan sebagai pemilik negara,
- lembaga negara sebagai pelaksana amanah,
- dan konstitusi sebagai kontrak hidup yang memungkinkan koreksi.

Negara pelayan tidak alergi terhadap kritik, karena kritik adalah bagian dari mekanisme perbaikan. Ia tidak membutuhkan populisme untuk legitimasi, karena legitimasinya datang dari pelayanan yang adil dan terasa.



Gambar 25. Ilustrasi Negara Pelayan Rakyat

9.3. Pemerintah sebagai Operator, Bukan Penguasa

Salah satu koreksi terpenting adalah reposisi pemerintah, terutama presiden sebagai operator negara, bukan pemilik kekuasaan. Pemerintah menjalankan fungsi eksekutif berdasarkan kontrak konstitusional yang ketat: tugas, batas, dan masa kerja.

Dalam kerangka ini:

- pemerintah bekerja, bukan memerintah sesuka hati;
- kebijakan adalah mandat, bukan privilese;
- dan jabatan adalah tanggung jawab, bukan kehormatan.

Reposisi ini memutus kebutuhan akan populisme. Operator tidak membutuhkan kultus personal, melainkan ukuran kinerja. Ia juga memutus patronase, karena kekuasaan tidak lagi menjadi sumber distribusi balas jasa, melainkan alat pelayanan publik.

9.4. Sistem Pengawasan Berlapis

Amandemen Kelima harus menghadirkan sistem pengawasan berlapis yang tidak bergantung pada satu lembaga atau satu aktor. Pengawasan harus bersifat:

- institusional,
- kultural,
- dan partisipatif.

Pengawasan institusional memastikan kekuasaan tidak melampaui batas hukum. Pengawasan kultural melalui nilai, etika, dan rasa malu untuk mencegah penyalahgunaan sebelum menjadi pelanggaran. Pengawasan partisipatif memastikan

rakyat memiliki jalur sah untuk mengoreksi kekuasaan tanpa kriminalisasi.

Sistem berlapis inilah yang membuat patronase sulit tumbuh dan populisme kehilangan panggung. Kekuasaan diawasi dari berbagai arah, bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari dalam dan dari rakyat sendiri.

9.5. Demokrasi yang Beradab dan Bertanggung Jawab

Tujuan akhir dari Amandemen Kelima bukan sekadar memperbaiki prosedur, melainkan mewujudkan demokrasi yang beradab dan bertanggung jawab. Demokrasi yang tidak berhenti pada pemilu, tidak dikuasai emosi sesaat, dan tidak disandera oleh jaringan kepentingan.

Demokrasi beradab adalah demokrasi yang:

- menghormati akal sehat,
- menjaga etika kekuasaan,
- dan memuliakan martabat rakyat.

Demokrasi bertanggung jawab adalah demokrasi yang:

- memungkinkan koreksi,
- menuntut pertanggungjawaban,
- dan mencegah kekuasaan bersembunyi di balik klaim legitimasi.

Amandemen Kelima UUD 1945, dalam bingkai ini, adalah jalan keluar konstitusional dari ilusi populisme dan jeratan patronase. Ia bukan langkah radikal yang merobohkan negara, melainkan tindakan dewasa untuk merawat republik agar kedaulatan rakyat kembali

nyata, kekuasaan kembali amanah, dan demokrasi kembali bermakna.



Gambar 26. Ilustrasi Demokrasi Beradan dan Bertanggung Jawab

BAB X
Penutup: Dari Kejahatan Politik ke Politik Kenegarawanan

Buku ini berangkat dari satu kesadaran pahit: demokrasi yang ramai belum tentu berdaulat, dan pemerintah yang meriah belum tentu jujur. Populisme menipu dengan janji, patronase menjerat dengan ketergantungan. Keduanya menjauhkan rakyat dari kedaulatannya sendiri. Penutup ini bukan sekadar rangkuman, melainkan penegasan arah bahwa jalan keluar ada, dan dapat ditempuh tanpa mengguncang republik: politik kenegarawanan yang bertumpu pada konstitusi, etika, dan tanggung jawab.

10.1. Mengakhiri Kejahatan Politik dan Ketergantungan

Kejahatan politik bekerja dengan meminjam masa depan untuk memenangkan hari ini. Ketergantungan bekerja dengan meminjam kekuasaan untuk mengikat esok hari. Keduanya menumpulkan akal publik dan memiskinkan kebijakan. Mengakhirinya berarti mengubah insentif: dari janji ke kinerja, dari ketergantungan ke kapasitas.

Negara perlu beralih dari kejahatan politik menuju politik sesungguhnya. Dari kebijakan simbolik menuju kebijakan berbasis kebutuhan. Dari legitimasi emosi menuju legitimasi hasil. Perubahan ini tidak menuntut retorika baru, melainkan arsitektur

konstitusional yang memaksa akuntabilitas dan membuka koreksi.

10.2. Melahirkan Negarawan, Bukan Politisi Populis

Negarawan lahir dari sistem yang menghargai akal, etika, dan keberanian menahan diri. Politisi populis lahir dari sistem yang memberi ganjaran pada pencitraan, mobilisasi emosi, dan kompromi transaksional. Karena itu, melahirkan negarawan bukan soal niat personal, melainkan desain institusional.

Politik kenegarawanan menuntut kepemimpinan yang melihat jabatan sebagai tugas, bukan kehormatan; kekuasaan sebagai amanah, bukan hak; dan kritik sebagai koreksi, bukan ancaman. Ia tidak menolak dukungan rakyat, tetapi menolak memanipulasinya. Ia tidak alergi popularitas, tetapi tidak bergantung padanya.

10.3. Peran Intelektual, Pengusaha, dan Masyarakat Sipil

Transisi menuju politik kenegarawanan membutuhkan ekosistem. Intelektual menjaga nalar dan kejujuran analisis, menolak penyederhanaan populis atas persoalan kompleks. Pengusaha menjaga etika ekonomi, memutus simbiosis rente–kekuasaan, dan berinvestasi pada produktivitas, bukan kedekatan. Masyarakat sipil menjaga ruang kritik, solidaritas, dan partisipasi bermakna.

Ketiganya tidak menggantikan negara, tetapi menyehatkannya menjadi penopang yang mencegah

kekuasaan melenceng dan membantu kebijakan kembali berpihak pada kepentingan umum.

10.4. Konstitusi sebagai Warisan, Bukan Alat Kekuasaan

Konstitusi bukan instrumen untuk mengamankan rezim, melainkan warisan nilai yang menuntun generasi. Ketika konstitusi diperlakukan sebagai alat kekuasaan, ia kehilangan martabat. Ketika ia diperlakukan sebagai warisan, ia dirawat, diuji, dan disempurnakan.

Amandemen konstitusi yang beradab, khususnya Amandemen Kelima adalah bentuk tanggung jawab generasional: memastikan kedaulatan rakyat bekerja nyata, kekuasaan terdistribusi, dan koreksi dimungkinkan tanpa kriminalisasi. Ini bukan langkah radikal, melainkan tindakan dewasa merawat republik.

10.5. Menuju Negara yang Jujur kepada Rakyatnya

Kejujuran negara bukanlah slogan, melainkan praktik: jujur tentang batas, jujur tentang tujuan, jujur tentang kegagalan, dan jujur dalam memperbaiki. Negara yang jujur tidak bersembunyi di balik klaim "atas nama rakyat" tanpa mekanisme dengar. Ia membuka ruang koreksi, menegakkan akuntabilitas, dan mengukur diri dari dampak nyata bagi warga.

Dari kejahatan politik menuju politik kenegarawanan, perjalanan ini menuntut keberanian. Bukan untuk merobohkan, tetapi untuk menata; bukan untuk mengutuk, tetapi untuk memperbaiki. Dengan

konstitusi sebagai kompas, kedaulatan rakyat sebagai tujuan, dan etika sebagai pagar, republik dapat kembali bermakna: jujur kepada rakyatnya, adil dalam kebijakannya, dan beradab dalam kekuasaannya.

Daftar Pustaka

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.

Hadiz, V. R. (2016). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge University Press.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown.

Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise and the Democratic Backsliding in Indonesia. Policy Studies.

Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Mueller, J. W. (2016). What is Populism?. University of Pennsylvania Press.

Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2020). Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. RoutledgeCurzon.

Sekolah Negarawan. (2025). Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945. Sekolah Negarawan.

Slater, D. (2018). Party Cartelization, Transition, and Democratic Regression in Indonesia. Journal of East Asian Studies.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.